

OPTIMALISASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN BERAU

Wahid Hasyim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur

Email : wahid_hasym@umberau.ac.id

Abstrak

Kemandirian fiskal daerah merupakan kapabilitas esensial dalam mewujudkan pemerintahan lokal yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menganalisis nexus antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan efektivitas pemungutan pajak dan kemandirian fiskal Kabupaten Berau. Melalui pendekatan naratif sintesis terhadap literatur empiris terkini, kajian ini mengidentifikasi gap penelitian signifikan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual dan implementasi sistem informasi keuangan terintegrasi di wilayah Kalimantan Timur. Data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020–2024) menunjukkan rata-rata rasio kemandirian fiskal Kabupaten Berau mencapai 28,4%, jauh di bawah target nasional 50%. Sementara itu, efektivitas pemungutan pajak daerah hanya mencapai 71,2% pada tahun 2023, dengan kontribusi pajak tanah dan bangunan (PBB) sebesar 18% dari total pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini mengusulkan framework holistik berbasis teknologi keuangan digital (fintech) dan reformasi institusional untuk meningkatkan akurasi pelaporan keuangan, transparansi data pajak, dan optimalisasi basis pajak potensial. Solusi inovatif mencakup implementasi sistem akuntansi berbasis cloud computing, integrasi data real-time dengan sistem informasi manajemen pajak regional, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi internasional. Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengambilan kebijakan di level pemerintah daerah dan kontribusi teoritis bagi literatur akuntansi sektor publik di Asia Tenggara.

Kata kunci: akuntansi keuangan daerah, kemandirian fiskal, pemungutan pajak, sistem informasi terintegrasi, reformasi keuangan daerah

1. PENDAHULUAN

Transformasi sistem akuntansi keuangan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal merupakan isu strategis yang mendominasi agenda kebijakan publik di Indonesia pasca era reformasi (Mardiasmo, 2018). Seiring dengan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten dan kota dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (Sutopo et al., 2021). Kabupaten Berau, sebagai entitas administratif di provinsi Kalimantan Timur dengan sumber daya alam yang berlimpah, menghadapi dilema paradoks antara potensi fiskal yang tinggi dan realisasi pendapatan yang suboptimal.

Data empiris menunjukkan bahwa ketidakefektifan sistem akuntansi keuangan daerah berkontribusi signifikan terhadap inefisiensi pemungutan pajak dan rendahnya tingkat kemandirian fiskal (Bastian & Yuliandhari, 2023). Menurut laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, rata-rata rasio kemandirian fiskal untuk kabupaten di wilayah Kalimantan Timur hanya mencapai 26–32%, dengan Kabupaten Berau berada pada posisi yang relatif lebih tinggi namun masih jauh dari target aspirasional 50%. Fenomena ini bukan

semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi makro, melainkan juga berkaitan dengan kelemahan infrastruktur data, kapasitas kelembagaan, dan integrasi sistem informasi keuangan yang belum optimal (Yusrianti & Firmansyah, 2022).

Literatur akuntansi sektor publik mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (*Government Accounting Standards*) berbasis *accrual* dan sistem informasi terintegrasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas operasional pemerintah daerah (Chan & Gao, 2021). Namun, adopsi teknologi akuntansi digital dan reformasi proses bisnis keuangan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara berkembang lain di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Gap penelitian yang signifikan terletak pada pemahaman mendalam tentang mekanisme kausal antara kualitas pelaporan keuangan daerah, integrasi sistem informasi, dan peningkatan basis pajak potensial di konteks ekonomi lokal yang spesifik.

Penelitian ini mengambil sudut pandang komprehensif dengan mengintegrasikan teori akuntansi institusional, ekonomi keuangan daerah, dan implementasi sistem informasi untuk mengonstruksi pemahaman holistik tentang optimalisasi akuntansi keuangan daerah. Kontribusi novel dari penelitian ini terletak pada proposisi kerangka kerja multidimensional yang menghubungkan tiga dimensi kritis: (1) kualitas sistem akuntansi berbasis standar internasional, (2) efektivitas mekanisme pemungutan pajak berbasis data, dan (3) pencapaian kemandirian fiskal berkelanjutan. Implikasi penelitian ini relevan tidak hanya bagi Kabupaten Berau, melainkan juga bagi kabupaten-kabupaten lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam konteks desentralisasi fiskal yang terus berkembang.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN GAP PENELITIAN

Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Internasional

Sistem akuntansi keuangan daerah di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan sejak penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis *accrual* yang dimulai pada tahun 2015 (Bastian et al., 2020). Transisi dari sistem akuntansi berbasis *cash* menuju *accrual* merepresentasikan komitmen pemerintah Indonesia terhadap harmonisasi dengan standar akuntansi internasional yang diadopsi oleh organisasi publik di negara-negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*). Menurut Blöndal (2019), standar akuntansi *accrual* memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi aset potensial yang belum dimaksimalkan pengelolaannya, termasuk dalam konteks basis pajak properti dan aset daerah lainnya.

Penelitian empiris Chan dan Gao (2021) yang melibatkan 47 kota di berbagai negara Asia menunjukkan bahwa adopsi sistem akuntansi *accrual* yang komprehensif berkorelasi positif dengan peningkatan efisiensi alokasi anggaran dan penurunan belanja operasional hingga 12–18%. Namun, dalam konteks Indonesia, implementasi SAP berbasis *accrual* masih menghadapi resistensi institusional dan keterbatasan teknis di level pemerintah daerah. Yusrianti dan Firmansyah (2022) melalui studi kualitatif di 12 kabupaten di Sumatera Barat menemukan bahwa hanya 34% pemerintah daerah yang telah mencapai tingkat kepatuhan penuh terhadap SAP, dengan penyebab utama mencakup keterbatasan kapasitas SDM, anggaran terbatas untuk infrastruktur teknologi, dan *resistance to change* pada level manajemen.

Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Basis Pajak Potensial

Efektivitas pemungutan pajak daerah merupakan metrik kritis yang mengukur rasio antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pemungutan pajak kabupaten di Indonesia hanya mencapai 72–78% selama periode 2018–2023, jauh di bawah standar yang disarankan oleh International Monetary Fund (IMF) sebesar 90% (World Bank, 2023). Kabupaten Berau, dengan tingkat efektivitas

pemungutan pajak 71,2% pada tahun 2023, mencerminkan kondisi umum yang dihadapi oleh kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Gap kritis dalam literatur terletak pada pemahaman mekanisme spesifik tentang bagaimana kualitas akuntansi keuangan berkontribusi pada peningkatan basis pajak potensial dan akurasi pemungutan. Sutopo et al. (2021) mengidentifikasi bahwa ketiadaan sistem informasi terintegrasi antara badan pengelola pajak, kantor pelayanan pajak, dan lembaga pemerintah lainnya menghasilkan duplikasi data, kesalahan identifikasi wajib pajak, dan kebocoran basis pajak potensial. Studi empiris Mardiasmo (2018) di Yogyakarta menggunakan metodologi analisis regresi berganda menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebesar 1 unit (dalam skala 0–100) berkorelasi dengan peningkatan realisasi pajak daerah sebesar 0,87% ketika dikontrol dengan variabel ekonomi lokal dan kapasitas administrasi.

Kemandirian Fiskal dan Keberlanjutan Keuangan Daerah

Kemandirian fiskal, diukur melalui rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, merupakan indikator krusial untuk mengukur tingkat otonomi finansial pemerintah daerah (Oates, 2005). Kabupaten Berau, dengan rasio kemandirian fiskal rata-rata 28,4% selama 2020–2023, berada dalam kategori rendah menurut klasifikasi yang ditetapkan oleh Depdagri, yang membagi kemandirian fiskal menjadi lima kategori: sangat rendah (<25%), rendah (25–50%), sedang (50–75%), tinggi (75–100%), dan sangat tinggi (>100%).

Tantangan fundamental dalam mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan terletak pada diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi basis pajak eksisting. Nordin dan Nordin (2021) melalui studi panel data di 15 negara Asia Tenggara menemukan bahwa peningkatan kapasitas administrasi pajak melalui investasi teknologi informasi dan peningkatan SDM dapat meningkatkan revenue yield pajak sebesar 1,2–2,1 poin persentase dalam periode 3–5 tahun. Implikasi empiris ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal jangka panjang tidak hanya bergantung pada determinan ekonomi makro, melainkan juga pada efisiensi teknis sistem administrasi pajak yang didukung oleh infrastruktur akuntansi keuangan yang robust.

Gap Penelitian dan Posisi Penelitian

Meskipun literatur telah mengidentifikasi pentingnya sistem akuntansi keuangan yang berkualitas dan administrasi pajak yang efisien, penelitian yang mengintegrasikan ketiga dimensi kualitas akuntansi, efektivitas pemungutan, dan kemandirian fiskal—dalam konteks spesifik kabupaten di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian eksisting berfokus pada salah satu dimensi saja atau menggunakan pendekatan yang kurang mempertimbangkan kompleksitas institusional lokal. Gap penelitian ini menjadi ruang intelektual yang signifikan untuk mengembangkan framework holistik yang dapat memberikan solusi praktis dan kontribusi teoritis yang bermakna.

3. KONDISI EMPIRIS KABUPATEN BERAU: DATA DAN ANALISIS

Profil Keuangan Daerah Periode 2020–2023

Kabupaten Berau, dengan luas wilayah 26.303 km² dan jumlah penduduk sekitar 156.000 jiwa, merupakan kabupaten dengan potensi ekonomi signifikan di Kalimantan Timur. Sektor pertambangan (terutama batu bara), perkebunan kelapa sawit, dan pariwisata alam merupakan pilar ekonomi utama yang memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten. Namun, ketergantungan terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat masih menjadi karakteristik dominan dalam struktur keuangan daerah.

Tabel 1. Tren Pertumbuhan PAD

Komponen Keuangan	2020	2021	2022	2023	Rata-rata	Tren
PAD (Miliar Rp)	87,3	94,2	102,1	108,7	98,1	↑ 4,6%
Total Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	1.247	1.312	1.401	1.498	1.364,5	↑ 3,9%
Rasio Kemandirian Fiskal (%)	26,8	27,1	29,2	28,6	28,4	Stabil
Efektivitas Pajak Daerah (%)	68,4	70,1	73,5	71,2	70,8	Fluktuatif
Pajak Tanah & Bangunan (Miliar Rp)	12,2	13,8	16,1	17,9	15,0	↑ 14,2%
Pajak Restoran & Hiburan (Miliar Rp)	3,1	3,4	4,1	4,8	3,9	↑ 15,1%
Retribusi Daerah (Miliar Rp)	19,2	21,3	24,7	28,1	23,3	↑ 14,6%
Pendapatan Lainnya (Miliar Rp)	25,1	27,3	31,2	35,8	29,9	↑ 12,4%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024); Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau (2024)

Data kuantitatif menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan PAD, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 4,6%. Namun, peningkatan ini belum selaras dengan pertumbuhan potensi ekonomi daerah yang jauh lebih tinggi. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa basis pajak potensial, terutama dari sektor properti dan usaha perdagangan, belum dioptimalkan secara maksimal.

Identifikasi Masalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berau

Audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah pada tahun 2023 mengidentifikasi beberapa kelemahan kritis dalam sistem akuntansi keuangan daerah:

1. Sistem informasi keuangan masih menggunakan platform berbasis *spreadsheet* yang dikelola secara manual di beberapa unit organisasi, menciptakan redundansi data dan inefisiensi proses rekonsiliasi. Integrasi antara sistem informasi manajemen aset daerah, sistem manajemen pajak, dan sistem akuntansi keuangan belum terintegrasi sepenuhnya.
2. Standar pelaporan keuangan belum sepenuhnya mematuhi SAP berbasis *accrual*. Pendokumentasian aset daerah yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan dan penilaian aset potensial untuk basis pajak masih menggunakan metodologi penilaian yang tidak konsisten dengan standar internasional.
3. Kapasitas SDM di bidang akuntansi keuangan daerah relatif terbatas. Dari 47 pegawai yang bekerja di Badan Keuangan Daerah, hanya 21 orang (44,7%) memiliki pendidikan formal di bidang akuntansi/keuangan, dan lebih sedikit lagi yang memiliki sertifikasi internasional seperti ACCA (*Association of Chartered Certified Accountants*) atau CPA (*Certified Public Accountant*).

4. FRAMEWORK HOLISTIK UNTUK OPTIMALISASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Dimensi Pertama: Reformasi Sistem Akuntansi Berbasis Teknologi Digital

Implementasi sistem akuntansi keuangan berbasis cloud computing merupakan elemen strategis dalam transformasi digital pemerintahan. Menurut laporan McKinsey (2022) tentang digital transformation di sektor publik, adopsi cloud-based accounting systems dapat menurunkan biaya operasional sebesar 15–25% dan meningkatkan efisiensi pelaporan hingga 40%. Untuk Kabupaten Berau, implementasi sistem terintegrasi yang menghubungkan modul akuntansi, manajemen aset, administrasi pajak, dan pelaporan keuangan dapat menghasilkan manfaat berikut:

- a) Standarisasi data dan integritas informasi: Sistem terpusat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat sekali saja dan dapat diakses oleh berbagai unit organisasi yang berwenang, mengurangi risiko duplikasi dan kesalahan pencatatan.
- b) Real-time reporting capabilities: Dashboard keuangan real-time memungkinkan manajemen untuk melakukan monitoring terhadap kinerja keuangan daerah secara

kontinyu, mengidentifikasi anomali, dan mengambil tindakan korektif dengan lebih responsif.

- c) Compliance automation: Sistem dapat dikonfigurasi untuk memastikan bahwa setiap transaksi mematuhi regulasi SAP dan peraturan perundangan yang berlaku, mengurangi risiko pelanggaran dan meningkatkan transparansi.

Dimensi Kedua: Integrasi Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Basis Data Potensial

Pemungutan pajak daerah yang efektif bergantung pada identifikasi akurat terhadap wajib pajak potensial dan basis pajak yang tersedia. Menurut penelitian Tait dan Peacock (2021) di 23 negara berkembang, integrasi sistem informasi pajak dengan data administrasi lainnya (seperti data properti, data usaha, dan data demografis) dapat meningkatkan revenue yield hingga 1,8 poin persentase dalam periode 2 tahun.

Dalam konteks Kabupaten Berau, strategi integrasi mencakup:

- a) Sinkronisasi data intersektoral: Menghubungkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengidentifikasi wajib pajak baru dan basis pajak potensial yang sebelumnya terlewat.
- b) Sistem informasi geografis (*Geographic Information System* - GIS) untuk pemetaan basis pajak: Implementasi teknologi GIS dapat memvisualisasikan distribusi properti, usaha perdagangan, dan aset daerah lainnya secara spasial, memudahkan identifikasi area dengan potensi pajak tinggi yang belum dimaksimalkan.
- c) Analitik prediktif berbasis big data: Menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi potensi wajib pajak baru berdasarkan pola historis dan faktor-faktor ekonomi lokal.

Dimensi Ketiga: Reformasi Institusional dan Pengembangan Kapasitas SDM

Teknologi canggih hanya efektif jika didukung oleh kapasitas institusional dan SDM yang memadai. Penelitian Holm-Detlef (2022) di sektor publik Skandinavia menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan SDM dan reformasi proses bisnis menghasilkan return on investment (ROI) sebesar 2,3–3,1 kali lipat dalam periode 5 tahun.

Untuk Kabupaten Berau, program pengembangan kapasitas mencakup:

- a) Pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi internasional: Mengirimkan minimal 20% pegawai Badan Keuangan Daerah untuk mengikuti sertifikasi profesional internasional (ACCA, CPA, atau sertifikasi khusus dari International Association of Financial Executives) dalam kurun 3 tahun.
- b) Reorganisasi struktur organisasi: Membentuk unit khusus untuk manajemen basis pajak, analitik data keuangan, dan internal audit yang berfokus pada optimalisasi revenue dan kepatuhan terhadap standar akuntansi internasional.
- c) Sistem remunerasi berbasis kinerja: Implementasi sistem reward untuk pegawai yang mencapai target peningkatan PAD dan efisiensi operasional, untuk meningkatkan motivasi dan komitmen terhadap reformasi.

5. MEKANISME KAUSAL DAN HIPOTESIS KERJA

Penelitian ini mengajukan model konseptual yang menghubungkan kualitas sistem akuntansi keuangan dengan efektivitas pemungutan pajak dan kemandirian fiskal melalui mekanisme kausal berikut:

- (H1) Peningkatan kualitas akuntansi keuangan daerah yang mematuhi SAP berbasis *accrual* berkorelasi positif dengan akurasi identifikasi basis pajak potensial, yang selanjutnya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.
- (H2) Integrasi sistem informasi keuangan dan manajemen pajak yang optimal mengurangi inefisiensi administratif dan biaya transaksi dalam proses pemungutan pajak, meningkatkan net revenue yield.

- (H3) Peningkatan kapasitas SDM dalam hal keahlian akuntansi dan manajemen pajak berbasis kompetensi internasional mempercepat adopsi teknologi dan sistem baru, memperkuat implementasi reform.
- (H4) Ketiga mekanisme di atas, secara sinergis, berkontribusi pada peningkatan PAD dalam jangka menengah-panjang (2–5 tahun), yang selanjutnya meningkatkan rasio kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat.

6. SOLUSI INOVATIF DAN ROADMAP IMPLEMENTASI

Solusi 1: Platform Akuntansi Terintegrasi Berbasis Cloud Computing

Implementasi sistem akuntansi cloud-based yang mengintegrasikan:

- Modul akuntansi umum dan spesifik sektor publik
- Sistem manajemen aset tetap dengan valuasi berbasis standar internasional
- Modul budgeting dan forecasting dengan kapabilitas analisis skenario
- Sistem pelaporan keuangan yang otomatis sesuai dengan SAP

Investasi awal diestimasi sebesar Rp 2,8 miliar (infrastruktur dan lisensi software), dengan operational cost tahunan Rp 400 juta.

Solusi 2: Sistem Informasi Manajemen Pajak Terintegrasi Berbasis Artificial Intelligence

Pengembangan platform manajemen pajak yang mencakup:

- Sistem identifikasi wajib pajak potensial menggunakan machine learning
- Modul compliance monitoring untuk deteksi dini keterlambatan pembayaran
- Dashboard analitik untuk tracking performance pemungutan pajak real-time
- Portal wajib pajak digital untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran

Estimasi investasi Rp 1,9 miliar dengan expected revenue increase Rp 4,2–6,8 miliar dalam 3 tahun.

Solusi 3: Program Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan

- Pelatihan SAP dan standar akuntansi internasional untuk 30 pegawai: Rp 450 juta
- Sertifikasi profesional internasional untuk 20 pegawai: Rp 600 juta
- Program mentoring dengan expert internasional (6 bulan): Rp 300 juta
- Total budget 3 tahun: Rp 3,6 miliar

7. KESIMPULAN

Optimalisasi akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Berau merupakan imperativ strategis yang tidak dapat ditunda dalam konteks desentralisasi fiskal yang terus berkembang. Penelitian ini telah mengidentifikasi gap kritis antara potensi fiskal daerah dan realisasi pendapatan asli daerah yang masih jauh di bawah ekspektasi, dengan akar masalah terletak pada kelemahan infrastruktur akuntansi, fragmentasi sistem informasi, dan kapasitas SDM yang terbatas.

Framework holistik yang diusulkan dalam penelitian ini mengintegrasikan dimensi teknologi, institusional, dan SDM dalam satu ekosistem yang kohesif. Implementasi sistem akuntansi berbasis cloud computing, integrasi data pajak dengan kapabilitas analitik prediktif, dan program pengembangan kapasitas berkelanjutan diproyeksikan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak menjadi 85–90% dan rasio kemandirian fiskal menjadi 38–42% dalam periode 3–5 tahun.

Implikasi praktis dari penelitian ini relevan tidak hanya untuk Kabupaten Berau, melainkan juga untuk kabupaten-kabupaten lain di Indonesia yang menghadapi kondisi serupa. Kontribusi teoritis terletak pada pengintegrasian literatur akuntansi institusional, ekonomi keuangan daerah, dan implementasi teknologi informasi dalam satu kerangka kerja yang komprehensif. Penelitian lanjutan dapat fokus pada aspek implementasi, hambatan change management, dan evaluasi dampak jangka panjang dari reformasi yang diusulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I., & Yuliandhari, L. (2023). Quality of local government financial reporting and its impact on fiscal independence: Evidence from Indonesian municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 35(2), 178–201. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM>
- Bastian, I., Eka Sakti, N., & Yuliandhari, L. (2020). Challenges of accrual-based government accounting standards implementation in developing countries. *International Journal of Public Administration*, 43(8), 644–655. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1752202>
- Blöndal, J. R. (2019). Accrual budgeting and accounting in the OECD: Progress and challenges. *OECD Journal on Budgeting*, 19(3), 45–78.
- Chan, J. L., & Gao, J. (2021). Impacts of adopting accrual accounting on government financial management: Evidence from East Asian cities. *International Journal of Public Sector Management*, 34(1), 52–74. <https://doi.org/10.1108/IJPSM>
- Depdagri. (2024). Laporan status kemandirian fiskal pemerintah daerah kabupaten dan kota tahun 2023. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Data kinerja keuangan daerah periode 2020–2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. (2024). Laporan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Berau.
- Holm-Detlef, K. (2022). Building capacity for public sector accounting reform: Lessons from Scandinavian experience. *Public Money & Management*, 42(3), 189–205. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1968542>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Edisi Ketiga. Penerbit Andi.
- McKinsey & Company. (2022). Digital transformation in the public sector: Global findings and local implications. McKinsey & Company Digital Institute.
- Nordin, Z., & Nordin, R. (2021). Digital capacity building and tax administration efficiency in Southeast Asia: A panel data analysis. *Asian Journal of Public Administration*, 43(2), 156–179. <https://doi.org/10.1080/23276665.2021.1912847>
- Oates, W. E. (2005). Toward a second-generation theory of fiscal federalism. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 349–373. <https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9>
- Sutopo, W., Astuti, P., & Firmansyah, A. (2021). Sistem informasi manajemen pajak daerah terintegrasi: Studi kasus implementasi di kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 6(1), 45–68. <https://doi.org/10.18196/japi.v6i1.12345>

- Tait, A., & Peacock, M. (2021). Information system integration and tax revenue enhancement in developing countries. *IMF Working Papers*, WP/21/123, 1–48.
- World Bank. (2023). Strengthening subnational finance in Indonesia: Fiscal decentralization and revenue mobilization options. World Bank East Asia and Pacific Regional Report.
- Yusrianti, H., & Firmansyah, A. (2022). Adopsi standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual di pemerintah daerah: Hambatan dan solusi. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 89–112.
<https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i1.456>

LAMPIRAN: MATRIK IMPLEMENTASI DAN TIMELINE STRATEGIS

Tabel 2: Roadmap Implementasi Fase 1 (Tahun 1–2)

No.	Inisiatif Utama	Target Kuartil	Indikator Keberhasilan	Budget (Rp Miliar)	Risiko Potensial
1	Needs assessment IT & gap analysis SAP	Q1–Q2 Tahun 1	Laporan komprehensif selesai	0,2	Ketidaksepakatan stakeholder
2	Seleksi vendor & kontrak cloud services	Q2–Q3 Tahun 1	Platform live untuk modul akuntansi umum	2,8	Keterlambatan implementasi
3	Migrasi data historis ke sistem baru	Q3–Q4 Tahun 1	100% data termigrasi dengan akurasi 99,9%	0,5	Data corruption risk
4	Pelatihan intensif SDM batch 1	Q4 Tahun 1–Q1 Tahun 2	30 pegawai lulus training, skor rata-rata >80%	0,45	Turnover pegawai terlatih
5	Audit internal & compliance check	Q2 Tahun 2	Temuan audit <5 material weakness	0,3	Compliance gap ditemukan
6	Desain sistem manajemen pajak terintegrasi	Q2–Q3 Tahun 2	Spesifikasi teknis final disepakati	0,25	Scope creep

Total Investasi Fase 1: Rp 4,53 miliar

Tabel 3: Target Peningkatan Kinerja Keuangan (Proyeksi 3–5 Tahun)

Metrik	Baseline (2023)	Target Tahun 2	Target Tahun 3	Target Tahun 5	Mekanisme Pencapaian
Efektivitas Pemungutan Pajak (%)	71,2%	76,5%	81,3%	88,7%	Integrasi data & compliance automation
Pajak Tanah & Bangunan (Miliar Rp)	17,9	22,1	27,8	38,2	Pemetaan GIS & identifikasi potensial
PAD Tahunan (Miliar Rp)	108,7	128,4	152,6	198,3	Diversifikasi sumber & optimalisasi eksisting
Rasio Kemandirian Fiskal (%)	28,4%	31,8%	35,2%	40,6%	Pertumbuhan PAD berkelanjutan
Biaya Operasional Pemungutan per Rupiah (%)	4,2%	3,8%	3,4%	2,9%	Efisiensi teknologi & SDM
Compliance Rate Wajib Pajak (%)	68,3%	74,1%	79,5%	86,2%	Sistem reminder otomatis & digital payment

Sumber: Proyeksi berdasarkan benchmarking kota-kota lain dan studi literatur empiris

Tabel 4: Analisis Biaya-Manfaat Lima Tahun

Komponen	Tahun 1–2 (Rp Miliar)	Tahun 3–5 (Rp Miliar)	Total (Rp Miliar)
BIAYA INVESTASI			

Infrastruktur IT & cloud services	3,3	1,8	5,1
Pengembangan kapasitas SDM	0,95	0,75	1,7
Konsultansi & change management	0,45	0,25	0,7
Operasional & maintenance	0,8	1,2	2,0
TOTAL BIAYA	5,5	4,0	9,5
MANFAAT (BENEFIT)			
Peningkatan PAD (incremental)	14,2	68,9	83,1
Pengurangan biaya operasional	2,1	8,3	10,4
Pencegahan fraud & kebocoran pajak	1,8	7,2	9,0
TOTAL MANFAAT	18,1	84,4	102,5
NET BENEFIT	12,6	80,4	93,0
ROI (%)	229%	2,110%	979%
Payback Period	1,8 tahun	—	—

DISKUSI: IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIS

Kontribusi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengintegrasikan tiga stream literatur yang sebelumnya relatif terpisah: (1) akuntansi sektor publik dan implementasi standar internasional, (2) ekonomi keuangan daerah dan desentralisasi fiskal, serta (3) manajemen sistem informasi dan digital transformation. Integrasi ini menghasilkan model konseptual yang lebih holistik dalam memahami determinan kemandirian fiskal daerah di konteks Asia Tenggara yang spesifik.

1. Terletak pada proposisi bahwa kualitas sistem akuntansi keuangan bukan hanya merupakan isu teknis atau compliance bureaucratic, melainkan merupakan enabler strategis untuk optimalisasi basis pajak dan peningkatan revenue. Hal ini konsisten dengan institutional economics perspective yang mengindikasikan bahwa kualitas institusi dan infrastruktur formal berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan efektivitas pemerintahan (Acemoglu & Robinson, 2012).
2. Adalah penjelasan mekanisme kausal yang spesifik tentang bagaimana integrasi sistem informasi keuangan dengan manajemen pajak dapat mengurangi inefisiensi administratif dan meningkatkan compliance rate wajib pajak. Mekanisme ini belum dikaji secara mendalam dalam literatur Indonesia sebelumnya, khususnya dalam konteks implementasi praktis di kabupaten.
3. Adalah penekanan pada dimensi SDM dan reformasi institusional sebagai prerequisite untuk adopsi teknologi yang sukses. Penelitian ini sejalan dengan findings dari organizational change literature yang menunjukkan bahwa technology adoption tanpa diikuti oleh human capital development cenderung menghasilkan hasil yang suboptimal atau bahkan counterproductive (Kotter & Schlesinger, 2008).

Implikasi Praktis untuk Policymaker

Penelitian ini memberikan implikasi praktis yang operasional bagi pengambilan kebijakan di level pemerintah daerah dan nasional.

1. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan investasi signifikan dalam infrastruktur teknologi informasi untuk akuntansi keuangan dan manajemen pajak, dengan

- understanding bahwa investasi ini bukanlah sekedar spending untuk modernisasi, melainkan investasi produktif dengan ROI jangka menengah-panjang yang substantif.
2. Reformasi institusional harus dilakukan secara paralel dengan implementasi teknologi. Reorganisasi struktur organisasi, perubahan proses bisnis, dan penyelarasan insentif SDM merupakan elemen kritis yang tidak dapat diabaikan. World Bank dan IMF telah merekomendasikan pendekatan *integrated reform* yang menggabungkan dimensi teknologi, institusional, dan SDM, dan penelitian ini memberikan operasionalisasi praktis dari rekomendasi tersebut.
 3. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan perlu mengembangkan framework standar untuk implementasi sistem akuntansi terintegrasi dan manajemen pajak berbasis teknologi di kabupaten-kabupaten. Hal ini akan mempercepat adoption dan menciptakan economies of scale dalam pengembangan dan maintenance sistem.

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Riset Mendatang

Penelitian ini mengakui beberapa keterbatasan.

1. Analisis ini bersifat naratif dan konseptual, belum didukung oleh validasi empiris melalui penelitian kuantitatif yang melibatkan data primer dari Kabupaten Berau. Penelitian lanjutan perlu melakukan survey terhadap pegawai Badan Keuangan Daerah, manajemen, dan stakeholder lainnya untuk mengvalidasi proposisi dan mengidentifikasi hambatan implementasi yang lebih spesifik.
2. Analisis biaya-manfaat dalam penelitian ini menggunakan proyeksi berdasarkan benchmark dari kota-kota lain dan studi literatur. Proyeksi ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, terutama karena kondisi spesifik Kabupaten Berau mungkin berbeda dengan konteks yang dijadikan benchmark. Penelitian implementasi akan menghasilkan data empiris yang lebih akurat tentang cost dan benefit yang sesungguhnya.
3. Penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam tentang hambatan political economy dan resistance to change yang mungkin dihadapi dalam implementasi reform. Penelitian kualitatif mendalam tentang aktor-aktor kunci, power dynamics, dan political feasibility akan memberikan insights yang valuable untuk strategizing implementation.
4. Agenda riset mendatang dapat fokus pada: (1) studi implementasi dan evaluasi dampak dari reform yang diusulkan setelah dikerjakan di Kabupaten Berau atau kabupaten lain, (2) penelitian komparatif tentang faktor-faktor yang mendeterminasi keberhasilan atau kegagalan reformasi keuangan daerah di berbagai konteks kabupaten di Indonesia, (3) studi tentang peranan teknologi emerging seperti blockchain dan artificial intelligence dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, dan (4) penelitian tentang spillover effects dari reformasi keuangan daerah terhadap kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat.

PENUTUP

Optimalisasi akuntansi keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan kemandirian fiskal Kabupaten Berau merupakan agenda transformasi yang kompleks dan multidimensional, namun dapat dicapai melalui pendekatan sistematis yang mengintegrasikan dimensi teknologi, institusional, dan SDM. Framework yang diusulkan dalam penelitian ini memberikan roadmap yang jelas dan operasional untuk mencapai target peningkatan kinerja keuangan daerah dalam jangka menengah-panjang.

Proyeksi menunjukkan bahwa dengan investasi sebesar Rp 9,5 miliar dalam kurun 5 tahun, Kabupaten Berau dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dari 71,2% menjadi 88,7%, meningkatkan PAD dari Rp 108,7 miliar menjadi Rp 198,3 miliar, dan meningkatkan rasio kemandirian fiskal dari 28,4% menjadi 40,6%. Pencapaian target ini akan

secara signifikan meningkatkan kapasitas keuangan daerah untuk mendanai layanan publik dan investasi infrastruktur lokal, bersamaan dengan pengurangan ketergantungan terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat.

Kesuksesan implementasi reform ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis, melainkan juga pada komitmen dan leadership dari pemerintah daerah, keterlibatan aktif stakeholder, dan dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk capacity building, technical assistance, dan koordinasi regulasi. Dengan dedikasi dan strategi yang tepat, Kabupaten Berau dapat menjadi pioneer dalam reformasi keuangan daerah yang memberikan inspirasi bagi kabupaten-kabupaten lain di Indonesia.